

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Pendidikan dan Pelatihan (diklat) merupakan suatu proses pembinaan pegawai dalam usaha membina kecakapan, keterampilan, dan kemampuan serta secara lebih terarah dalam rangka pelaksanaan tugas dan untuk mencapai tujuan organisasi.

Kebijakan Pemerintah Pusat tentang Pendidikan dan Pelatihan (diklat) Aparatur seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), didasarkan pada pemikiran sebagai berikut :

1. Pendidikan dan Pelatihan (diklat) merupakan bagian integral dari sistem pembinaan Pegawai Negeri Sipil.
2. Pendidikan dan Pelatihan (diklat) mempunyai keterkaitan dengan pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil.
3. Sistem Pendidikan dan Pelatihan (diklat) meliputi proses identifikasi kebutuhan, perencanaan, penyelenggaraan, serta evaluasi dan pengembangan.
4. Pendidikan dan Pelatihan (diklat) diarahkan untuk mempersiapkan Pegawai Negeri Sipil agar memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan dan kebutuhan organisasi, termasuk pengadaan kader pimpinan dan staf.

Guna menjamin efektivitas penyusunan program pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan (diklat) Aparatur di Wilayah Jawa Barat, maka pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan (diklat) harus mengacu pada Standar Manajemen Penyelenggaraan Diklat. Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2004 tentang Standar Manajemen Pendidikan dan Pelatihan (diklat) Aparatur.

Standar Manajemen Pendidikan dan Pelatihan (diklat) disusun dalam rangka memfasilitasi kegiatan pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan (diklat) oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat, yang diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan (diklat) Aparatur di daerahnya. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari adanya Standar Manajemen Pendidikan dan Pelatihan (diklat) Aparatur di Jawa Barat adalah :

1. Sebagai dasar acuan pengelolaan diklat aparatur bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi yang harus dilakukan dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengembangkan Pendidikan dan Pelatihan (diklat).
2. Mengoptimalkan pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan (diklat) Aparatur di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pengelolaan program Pendidikan dan Pelatihan (diklat) akan berhasil dengan baik apabila dalam pelaksanaannya mengacu pada prinsip-prinsip pendekatan sistem. Kerangka berfikir sistem dalam Pendidikan dan Pelatihan (diklat) dimulai dari tahap perencanaan, penyiapan sarana dan prasarana, penetapan komponen pembiayaan, penyelenggaraan, evaluasi dan pengembangan, serta pelaporan.

Dalam penulisan penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dasar Metode Deskriptif adalah penelitian yang menyangkut peristiwa yang sedang terjadi dan berhubungan dengan kondisi sekarang. Penelitian ini merupakan suatu upaya mendeskripsikan kejadian-kejadian yang dipotret menjadi sumber perhatian. Hasil penelitian ini merupakan upaya pengumpulan data yang disajikan dalam bentuk laporan atau uraian dari perkembangan yang terjadi di lapangan secara wajar disamping sikap dan perbuatan sehingga dapat memahami masalah atau situasi yang disebut *natural setting*.

Dalam melaksanakan suatu kegiatan, pastilah selalu saja ada hambatan-hambatan yang timbul baik dari panitia penyelenggara diklat

(seperti perencanaan diklat, penyelenggaraan diklat, evaluasi diklat, tenaga pengajar/widyaiswara) maupun dari peserta diklat merupakan permasalahan klasik, dimana permasalahan itu selalu muncul. Tetapi hambatan atau masalah itu bisa di minimalisir dengan melakukan upaya penanggulangan yang baik. Pada dasarnya upaya yang paling ampuh dalam menghadapi permasalahan yang timbul adalah adanya kerjasama dan koordinasi yang baik dalam penyelenggaraan diklat tersebut.

Penelitian memfokuskan kepada Manajemen Penyelenggaraan Diklat Teknis Jenjang Fungsional Perencana Muda. Tujuan dari diadakannya Diklat Teknis Fungsional Perencana Muda adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta peningkatan kinerja yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sebagai seorang Perencana Muda untuk menciptakan dan merencanakan sumber daya yang ada di instansi masing-masing serta mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan penguasaan pengetahuan dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan atas pembahasan penelitian mengenai Efektivitas Manajemen Diklat Teknis Jenjang Fungsional Perencana Muda ini menitik beratkan pada proses perencanaan diklat, penyelenggaraan diklat, dan evaluasi Diklat Teknis Jenjang Fungsional Perencana Muda. Semua aspek itu berjalan secara efektif dan berkategori **BAIK**, maka dapat disimpulkan Manajemen Penyelenggaraan Diklat Teknis Jenjang Fungsional Perencana Muda yang diselenggarakan berjalan secara **EFEKTIF**. Dikatakan efektif dilihat dari indikator keberhasilannya. Indikator keberhasilan dilihat dari segi evaluasi yaitu dilihat dari prosesnya, yaitu penyelenggaraan diklat berjalan dengan lancar, seluruh fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan seluruhnya mendukung dalam penyelenggaraan diklat, widyaiswara tepat waktu dan berkompeten, serta dalam proses evaluasi diklat yang dilaksanakan oleh Bidang Evaluasi Diklat, diperoleh hasil evaluasi akademik maupun sikap dan perilaku peserta Diklat Teknis Fungsional Perencana Muda skornya diatas 70.

B. SARAN

Walaupun secara keseluruhan diperoleh hasil yang efektif dari proses manajemen penyelenggaraan diklat teknis jenjang fungsional perencana muda yang berdasarkan pengamatan langsung, wawancara dan hasil dokumentasi tetap saja ada beberapa yang harus diperbaiki untuk mencapai hasil diklat yang lebih baik di masa yang akan datang.

Untuk itu, berkaitan dengan masalah yang diteliti yang berhubungan tentang **Efektivitas Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis Jenjang Fungsional Perencana Muda** ini, peneliti memberikan beberapa saran atau rekomendasi dan diharapkan rekomendasi ini dapat dijadikan masukan untuk perbaikan penyelenggaraan diklat yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

Adapun saran atau rekomendasi sebagai berikut :

1. Bagi perencanaan diklat, keseluruhan proses perencanaan sudah berjalan dengan baik mulai dari proses analisis kebutuhan sampai dengan kurikulum dan metode yang digunakan. Oleh sebab itu diharapkan panitia bidang perencanaan diklat lebih meningkatkan kemampuan menganalisisnya dalam menganalisis kebutuhan program diklat sehingga adanya kesesuaian yang optimal antara materi diklat dengan kebutuhan pegawai dimasa datang.
2. Dari hasil wawancara dengan salah satu pegawai didapat bahwa hasil dari kegiatan diklat tidak segera ditindak lanjuti karena banyaknya kegiatan-kegiatan yang harus diselesaikan. Maka ada baiknya antara satu bidang dengan bidang lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan diklat melakukan suatu kerjasama yang baik.

Kerjasama merupakan alat yang ampuh dalam mengatasi permasalahan yang timbul dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Oleh karena itu kerjasama dan koordinasi harus terus di jaga baik dalam melaksanakan suatu kegiatan diklat maupun untuk tindak lanjut suatu hasil pelaksanaan diklat agar mengetahui sejauhmana manfaat dari diklat yang sudah dilaksanakan.

3. Berkaitan dengan penyelenggaraan diklat yang mempengaruhi proses pembelajaran baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti pelayanan pengadaan modul pembelajaran untuk peserta diklat, penyediaan sarana dan prasarana/fasilitas serta memberikan kenyamanan bagi peserta diklat dan widyaiswara agar penyelenggaraan diklat berjalan dengan tertib, kondusif, dan menyenangkan.
4. Pelayanan yang dilakukan oleh panitia penyelenggara diklat mulai dari proses administrasi sampai dengan proses pembelajaran sudah baik, semoga bisa dipertahankan agar pelayanan yang diberikan menjadi lebih baik lagi.
5. Berdasarkan hasil akhir dari penyelenggaraan Diklat Teknis Jenjang Fungsional Perencana Muda, diharapkan seluruh peserta diklat dapat berdaya guna dan dapat mengaplikasikan ilmunya sehingga ada pengembangan baik pengetahuan, wawasan, sikap dan perilaku, serta diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan kompetensi aparatur pemerintah dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
6. Peningkatan kinerja dari pihak panitia penyelenggara bisa dilakukan dengan tetap fokus untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sebagai tanggung jawab dinas, meskipun beban pekerjaan sangat berat dan tidak ada jaminan bahwa hasil dari evaluasi penyelenggara diklat tersebut akan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait.